

## ABSTRAK

Abdul Haris Sandia, Enforcement of Article 32 Paragraph (1) Jo Article 27 Paragraph (1) Ternate City Regulation No. 3 of 2017 concerning the Implementation of Advertisements in the City of Ternate”. Supervised by Syawal Abdulajid, as First Advisor and Arisa Murni Rada, As Second Advisor.

The problem with the title of this thesis, is to find out (1) the enforcement of Article 32 Paragraph (1) Jo Article 27 Paragraph (1) Ternate City Regional Regulation No. 3 of 2017. And (2) What Factors Affect the Enforcement of Article 32 Paragraph (1) Jo Article 27 Paragraph (1) Ternate City Regional Regulation No. 3 of 2017.

Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian Empiris yaitu penelitian hukum yang didasarkan pada kenyataan-kenyataan yang ada di masyarakat terkait dengan masalah Penegakan Pasal 32 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Ternate No. 3 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Reklame Di Kota Ternate.

Hasil dari penulisan skripsi ini, dapat diperoleh kesimpulan bahwa Ketentuan penyelenggaraan reklame yang diatur dalam peraturan daerah Kota Ternate Nomor 03 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Reklame, karena masih banyak pelaku usaha yang melakukan pelanggaran reklame yang sampai saat ini belum di tegakan sesuai Perda Kota Ternate. Bentuk penegakan hukum yang sejauh ini yang telah dilakukan oleh Satpol PP adalah pemberian teguran terhadap pelaku usaha, kemudian kegiatan penindakan langsung kelokasi yang sering dijadikan tempat pemasangan baliho atau penempelan stiker, serta pembinaan terhadap pelaku usaha yang kedapatan kembali memasang baliho atau stiker. Dalam pelaksanaan penegakan hukum oleh Satpol PP Kota Ternate terhadap Perda No. 03 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Reklame, banyak kendala yang sering didapatkan oleh Satpol PP yang secara garis besar berupa faktor Aparat Penegak Hukumnya yang kurang profesional, faktor masyarakatnya dimana faktor ini berbicara struktur maupun para pedagang yang sering kali mengulangi perbuatan yang melanggar ketentuan dalam perda tersebut dan akibat dari minimnya tingkat kesadaran hukum dan kepatuhan hukum dalam masyarakat Kota Ternate.

Kata Kunci : *Penyelenggaraan Reklame, Peraturan Daerah, Penegakan*